

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kepercayaan terhadap kemampuan untuk menyelesaikan persoalan tanpa bantuan khusus orang lain, keengganan untuk dikontrol orang lain, mampu melakukan kegiatan dan menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi merupakan bagian dari konsep kemandirian yang disampaikan Aprilia (2009). Konsep kemandirian tersebut menjadi dasar pijakan penelitian ini yang lebih spesifiknya fokus pada masalah kemandirian ekonomi yang diasumsikan dapat jadi salah satu solusi untuk kesejahteraan masyarakat (Novalina dan Rusiadi, 2008) tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas melalui pengoptimalan potensi yang dimiliki (Wasita, 2019). Tehrani (2004), menjelaskan bahwa mandiri secara ekonomi yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas mensejahterakan (diri), tidak membutuhkan dan tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan persoalan ekonomi.

Kemandirian ekonomi biasanya diupayakan dengan bekerja. Bagi penyandang disabilitas, pemerintah telah menjamin akses yang setara terhadap manfaat dan program dalam system jaminan social nasional dibidang ketenagakerjaan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, BUMD wajib memperkerjakan palking sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja (Undang-Undang No.08 Tahun 2016). Hal tersebut merefleksikan telah meningkatnya upaya untuk

memerangi pengucilan serta tidak diberikannya peluang yang setara kepada penyandang disabilitas (Internasional Labour Organization, 2013).

Namun nyatanya sampai saat ini pelibatan kaum penyandang disabilitas sebagai karyawan perusahaan ataupun pegawai instansi pemerintah dinilai masih minim (Triyudha, 2018). Ketiadaan kerjasama antara institusi diperkirakan menjadi salah satu penyebabnya, padahal pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas hanya biasa dilakukan jika kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha/industry dilakukan secara terorganisir dan sinergis (permanaetal.,2019) misalnya melalui kegiatan magang ( Myklebust & Finnove,2015), penempatan dalam pekerjaan yang tidak terampil (Schriner,2001) menjadi deretan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas di dunia kerja. Menurut Coordinator Wilayah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Surabaya bahwa minimnya serapan pekerja dari kelompok penyandang disabilitas diidentifikasi karena cost untuk memperkerjakan penyandang disabilitas dianggap tinggi (Kustiani, 2019).

Pada dasarnya ada banyak cara dalam mengupayakan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas, meskipun sebuah studi menunjukkan bahwa peluang untuk mencapai kemandirian ekonomi lebih tinggi untuk pria dari pada wanita, lebih tinggi untuk wanita muda tanpa anak dari pada mereka yang memiliki anak, dan lebih baik bagi mereka yang memiliki kemampuan fungsional tinggi dibandingkan mereka yang memiliki tingkat fungsional lebih rendah (Myklebust & Finnove, 2005), namun hal yang paling fundamental dalam masalah kemandirian adalah ketrampilan (skill) yang

dimiliki masyarakat disabilitas. Dengan terbatasnya lowongan pekerjaan, bukan hal mustahil lagi bagi penyandang disabilitas yang memiliki skill bias mandiri secara ekonomi, misalnya dengan berwirausaha

Lebih lanjut, masalah ketrampilan diatas menggaris bawahi perlunya pengembangan skill bagi penyandang disabilitas diantaranya melalui pelatihan. Kegiatan pelatihan diarahkan pada realisasi ketrampilan yang dibutuhkan dunia kerja (Baker-Ericzenetal, 2009), sehingga dapat memfasilitasi proses integrasi mereka dalam dunia kerja, bagi yang sudah bekerja, pelatihan ketrampilan ini juga menjadi upaya pengembangan karir mereka yang melibatkan pengetahuan diri tentang kepribadian, minat, ketrampilan dan kemampuan (Kerka, 2002) sebelum dilakukan pelatihan, dilakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk memastikan bahwa para partisipan yang mengikuti pelatihan adalah orang yang tepat. Sisi pentingnya juga dalah untuk mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan serta metodenya sesuai dengan tema pelatihan. Maka dari itu, pelatihan bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan bagi penyandang disabilitas baik yang belum maupun sudah bekerja sebagai upaya pengembangan skill dan karir mereka untuk kemandirian ekonomi di masa depan.

Badan statistik Indonesia (BPS) Indonesia yang mengemukakan bahwa secara rata-rata terdapat 14 sampai 15 pemuda Indonesia dari setiap 100 angkatan kerja belum mempunyai pekerjaan. Pada tabel satu memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran diperkotaan lebih besar yaitu mencapai 16,49%, dibandingkan dengan di pedesaan yang mencapai 13,31%.

Data tersebut juga menunjukkan jumlah pemuda pengangguran di Indonesia yang terbesar adalah pemuda yang berpendidikan sekolah menengah (SMA dan sederajat). Urutan kedua pemuda pengangguran dengan pendidikan perguruan tinggi (PT) yaitu 13,80%. Sedangkan SMP dan sederajat menempati urutan ketiga yaitu 13,55%. Hal ini sungguh merupakan ironi, dimana justru pengangguran terbesar Indonesia adalah pemuda yang memiliki pendidikan tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas dan sederajat) serta pemuda dengan pendidikan ti perguruan tinggi.

**Tabel 1.1**

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda**

**Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2014**

<b>Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan</b>	<b>Perkotaan (K)</b>	<b>Pedesaan (D)</b>	<b>K+D</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	20,49	2,70	4,51
Tidak Tamat SD	13,81	6,89	8,98
SD/sederajat	12,93	8,67	10,02
SMP/sederajat	14,16	13,09	13,55
SM/sederajat	19,16	20,34	19,56
PT	13,91	13,50	13,80
<b>Jumlah</b>	<b>16,49</b>	<b>13,31</b>	<b>14,97</b>

*Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014*

Tingginya angka pengangguran pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA mengisyaratkan pentingnya integrasi pendidikan kewirausahaan diinstitusi pendidikan. Data tersebut juga menyiratkan untuk menyelesaikan persoalan pengangguran dan kemiskinan, tidak ada jalan lain selain upaya menggalakkan masyarakat dengan berwirausaha. Setidaknya, semangat wirausaha sebagai salah satu alternatif bagi Negara untuk menyelesaikan

problem kemiskinan dan pengangguran tersebut. Hal serupa juga dihadapi penyandang disabilitas. Bahkan, problem penyandang disabilitas jauh lebih serius dalam mengakses kesempatan bekerja. Data *national organization on disability* menunjukkan bahwa dari 54 penyandang disabilitas di Amerika, 22 juta diantaranya adalah pengangguran (*unemployed*)

Tingginya tingkat pengangguran dan penyandang disabilitas disebabkan banyak faktor. Diantaranya persoalan yang dialami oleh para penyandang disabilitas kesulitan mendapatkan peluang bekerja karena kesulitan aksesibilitas. Belum termasuk, menghadapi *stereotype* sebagai individu yang tidak mampu, tidak berdaya, dan perlu dibelaskasihani. Hal ini menyebabkan kurangnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas fisik. Apalagi, perusahaan cenderung abai dan menolak penyandang disabilitas fisik ketika melamar pekerjaan dengan alasan tidak mampu bekerja dan tidak ada akses pendukung layanan bagi penyandang disabilitas.

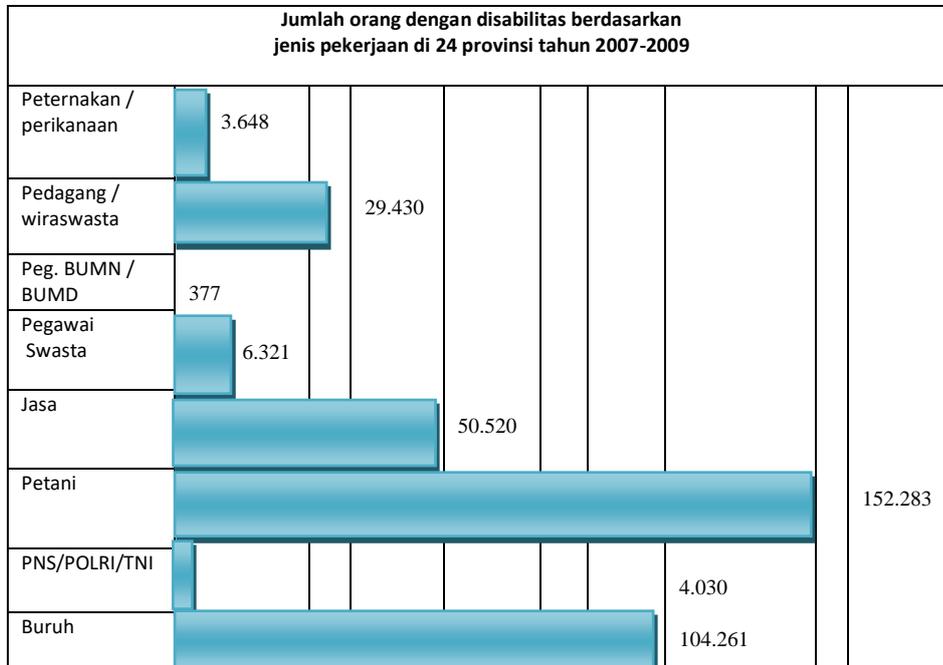
Sebagai individu dengan keterbatasan fisik atau disabilitas, kerap kali menghadapi *stereotype* masyarakat umum yang tidak menguntungkan, apalagi sampai mempengaruhi kinerjanya. Kendati demikian, banyak disabilitas yang dapat membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah hambatan bagi mereka untuk beraktivitas. Justru dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, dapat menjadi motivasi untuk lebih maju, berkembang seperti orang-orang normal lainnya, termasuk dalam hal bekerja, bahkan mampu memberdayakan orang lain dengan cara berwirausaha.

Keterbatasan pemilihan karier maupun pemilihan jenis usaha, selain peluang kerja merupakan salah satu peoblem disabilitas. Padahal kalau mau jujur, sejatinya para penyandang disabilitas, sebagai bagian dari masyarakat juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam meencari nafka dan kontribusi dalam membuka peluang dengan berwirausaha. Mereka juga harus mandiri secara pribadi maupun secara ekonomi.

Hal ini diperkuat oleh hasil survey ICF, di 14 provinsi di Indonesia, yang pada intinya bahwa hanya 25,6% penyandang disabilitas yang bekerja dan sisanya 74,75% tidak bekerja. Dari total 25,6% penyandang disabilitas yang bekerja itupun terbanyak bekerja sebagai petani dan buruh. Kementrian Republik Indonesia melalui Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahtraan Sosial (Pusat Data dan Informasi Kesejahtraan Sosial) mengeluarkan data mengenai penyandang disabilitas berdasarkan jenis pekerjaan yang secara terperinci dapat dilihat pada **Diagram 1**. Data pada tahun 2007-2009 menunjukkan bahwa sebesar 152,238 disabilitas bekerja sebagai petani dan urutan kedua adalah disabilitas dengan jenis pekerjaan sebagai buruh. Paling sedikit adalah disabilitas yang bekerrja sebagai pegawai BUMN/BUMD. Hal ini berarti sangat sedikit disabilitas yang bisa bekerja di badan-badan usaha milik pemerintah.

## Diagram 1

### Data Disabilitas Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2007-2008



Sumber: *pusdatin kesos*

Jika mencermati UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, pasal 14 sebenarnya telah mengatur tentang kewajiban bagi pemilik usaha yang memiliki pekerja minimal 100 orang diharuskan juga mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1 orang. Itu artinya terdapat kuota 1% penyandang disabilitas pada jenis usaha dengan minimum 100 orang karyawan. Namun implementasi pasar tersebut, tampaknya tidak banyak dijalankan pemilik usaha.

Kewirausahaan telah datang untuk dianggap sebagai alat penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan penyandang cacat. Melalui wirausaha *entrepreneur* dengan disabilitas mendapatkan kesempatan untuk menyesuaikan pekerjaan difabel dengan kebutuhannya. Kaum disabilitas yang mengetahui keterbatasannya, akan melihat wirausaha

sebagai peluang dalam bekerja. Karena kewirausahaan menawarkan kesempatan untuk individu-individu yang mungkin merasa terhambat dalam korporasi yang telah mapan.

Regulasi pemerintah telah memberikan penguatan terhadap hak disabilitas agar memiliki kesetaraan dalam bekerja. Hal ini ditandai dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang tentang penyandang disabilitas No 8 di tahun 2016, serta Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Program pelatihan dan pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan upaya memberikan kesempatan bagi disabilitas agar dapat mandiri secara ekonomi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengakses program pemberdayaan ekonomi. Kesempatan tersebut diberikan dengan mengikuti berbagai keterampilan dan bantuan modal. Praktik pemberdayaan bidang ekonomi bagi penyandang disabilitas secara umum mempunyai dimensi pendekatan antara lain

1. Bantuan modal bergulir
2. Bantuan pembangunan prasarana
3. Pengembangan kelembagaan lokal
4. Penguatan dan pembangunan kemitraan usaha
5. Fasilitasi dari pendamping usaha

Pada penyandang disabilitas yang berusia di atas 20 Tahun (fase masa dewasa awal), individu akan mulai merubah pola berfikir dan perspektifnya karena pada masa dewasa awal minatnya lebih ditekankan pada hal-hal yang menunjang pada kehidupan keluarga, misalnya uang dan rumah. Di usia tersebut pertimbangan pilihan karier sebagai wirausaha dipengaruhi oleh preferensi resiko yang akan ditanggung kemudian

Untuk meningkatkan kemampuan baik *hard skill* maupun *soft skill* inilah, maka diperlukan pelatihan. Hasil studi pendahuluan dan wawancara dengan organisasi PERPENCA (Persatuan Penyandang Cacat), diperoleh gambaran bahwa banyak penyandang disabilitas yang ingin berdaya secara ekonomi. Aksesibilitas yang kurang merata dan keterbatasan yang dimiliki menjadi salah satu alasan penyandang disabilitas berwirausaha. Melalui wawancara dengan wirausaha disabilitas yang telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, dalam hal ini dinas sosial, dan dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember, diperoleh informasi bahwa pelatihan mampu menambah informasi dan meningkatkan keterampilan disabilitas, namun materi yang diberikan masih belum sepenuhnya selesai harapan peserta pelatihan. Sarana yang digunakan dalam pelatihan masih nampak kurang memadai.

Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan satu minggu hingga beberapa bulan (tergantung kebutuhan pelatihan), memberikan gambaran bahwa target pendidikan dan pelatihan tersebut adalah peningkatan keterampilan dan pembinaan dalam berwirausaha. Terdapat beberapa tahapan

pelatihan secara garis besar terbagi dua yaitu pelatihan bagi pemula dan pelatihan tersebut adalah peningkatan keterampilan dan pembinaan dalam berwirausaha. Terdapat beberapa tahapan pelatihan yang secara garis besar terbagi dua yaitu pelatihan bagi pemula dan pelatihan lanjutan. Beragam pelatihan yang diberikan antara lain dalam tata busana, tata rias, tata boga, hingga pelatihan *massage*.

Berbagai upaya tersebut mampu menumbuhkan motivasi penyandang disabilitas berwirausaha, namun ada pula penyandang disabilitas yang kurang memiliki keberanian dan bahkan tidak berminat berwirausaha. Rendahnya minat penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan disebabkan jenis pelatihan yang masih difokusnya pada pelatihan tata busana,tata rias, dan *massages*saja. Perkembangan kemajuan teknologi yang pesat,belum disikapi dengan penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi dan komputer. Karena itu, fokus diskusi ini diarahkan pada pengaruh pelatihan dan pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha dikalangan penyandang disabilitas.

Penelitian terdahulu oleh (Vera Firdaus-Hisbiyatul Hasanah,2018) dengan judul penelitian “pengaruh pelatihan dan Pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha pada penyandang disabilitas di kabupaten jember” dan hasil penelitian menunjukkan pelatihan berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha dengan nilai sig.(2-tailed) 0,005. Pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha dengan nilai sig.(2-tailed) 0,000. Pelatihan dan Pendidikan kewirausahaan secara

Bersama-sama mempengaruhi motivasi berwirausaha dengan nilai F hitung sebesar 15,514 angka signifikansi sebesar 0,000.

Penelitian terdahulu oleh (Muh. Fahurorrozi<sup>1</sup>, Huzain Jailani<sup>2</sup>, Yogi Rahmadi Putra<sup>3</sup>) dengan judul penelitian “pengaruh Pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha dan motivasi berwirausaha” dan hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh positif Pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha ditunjukkan oleh besarnya nilai F hitung 28,577 dengan signifikansi sebesar 0,000. (2) terdapat pengaruh positif Pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha ditunjukkan oleh

. Berdasarkan atas pertimbangan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Pelatihan Dan Pendidikan Terhadap Motivasi Berwirausaha Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Kupang**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Analisis Pengaruh Pelatihan Dan Pendidikan terhadap Motivasi Berwirausaha Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Kupang.

## **1.3. Persoalan Penelitian**

1. Apakah pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berwirausaha bagi penyandang disabilitas di Kota Kupang?
2. Apakah pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berwirausaha bagi penyandang disabilitas di Kota Kupang?

3. Apakah motivasi berwirausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelatihan dan Pendidikan?

#### **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan persoalan tersebut yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap motivasi berwirausaha bagi penyandang disabilitas di Kota Kupang.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap motivasi berwirausaha bagi penyandang disabilitas di Kota Kupang.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh motivasi berwirausaha terhadap pelatihan dan Pendidikan.

##### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

###### **a. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam dunia kerja khususnya dalam berwirausaha sebagai informasi, sehingga dimasa yang akan datang dapat menjadi pedoman yang tepat untuk meningkatkan minat dalam berwirausaha bagi semua orang terkhususnya penyandang disabilitas.

b. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan praktek yang terjadi.